

**”PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN RAKYAT
MELALUI PROGRAM GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN (GNRHL) SERTA MANFAAT EKONOMI TERHADAP
KONDISI RUMAH TANGGA MASYARAKAT”**

*(Studi Kasus Kelompok Tani Pelaksana Hutan Rakyat di Nagari Panningahan Kecamatan
Junjung Sirih Kabupaten Solok)*

OLEH

NIA MAWAR SARI

05114075



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN RAKYAT MELALUI PROGRAM
GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GNRHL) SERTA MANFAAT
EKONOMI TERHADAP KONDISI RUMAH TANGGA MASYARAKAT**

*(Studi Kasus Kelompok Tani Pelaksana Hutan Rakyat di Nagari Paninggahan Kecamatan
Junjung Sirih Kabupaten Solok)*

Ringkasan dari laporan tugas akhir mahasiswa S1 Prodi Agribisnis di bawah bimbingan
Prof.Dr.Rudi Febriamansyah,M.Sc dan Cipta Budiman, S.Si. MM

Nia Mawar Sari (05114075)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan program Hutan Rakyat, mengevaluasi pelaksanaan program Hutan Rakyat dan menganalisa manfaat ekonomi dari kegiatan Hutan Rakyat terhadap kondisi rumah tangga masyarakat di Nagari Paninggahan kecamatan junjung sirih. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan program Hutan Rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2003-2007, telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan, namun masih ada kendala dalam pelaksanaan program yaitu pada sosialisasi program dan pengawasan program masih kurang terlaksana dengan baik namun hal ini tidak menghalangi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Dari evaluasi pelaksanaan program Hutan Rakyat ditinjau dari segi (1) Mutu program menurut petani maupun *stakeholders* masuk dalam kategori sesuai (2) Kesesuaian biaya program, Kesesuaian biaya oleh pengelola berada pada kategori sangat sesuai dan kesesuaian biaya oleh petani berada pada kategori sesuai. dan (3) Kesesuaian waktu program berada pada kategori sesuai. Dari program Hutan Rakyat ini petani juga memperoleh manfaat ekonomi berupa pendapatan yang bersumber dari pendapatan sebelum tanaman Hutan Rakyat menghasilkan yang berasal dari hasil tanaman sampingan (tanaman cabe) dan upah yang diperoleh dari dana program dan pendapatan setelah tanaman Hutan Rakyat menghasilkan.

Keyword : Rehabilitasi Hutan Rakyat

Abstract.This study aims to evaluate implementation of programme on land rehabilitation and reforestation, to analyze its impact on household income. There were 40 respondents who grouped into two. First is *stakeholders*, such as manager, vice manager, administrator and controller. Second is programme's participants from Alam Guci, Sahara Makmur and Tunas Baru farmer group at Nagari Paninggahan. Participatory Rural Appraisal (PRA) and in-depth interview were carried out in data collection. Data, then, is analyzed qualitatively.

The steps of programme implementation, which had been carried out during 2003-2007, are preparation, implementation, and controlling. It met the programme guidelines. Although some activities were not well implemented such as dissemination and controlling, participants can follow the programme. The programme significantly contributed in forest improvement in Nagari Paninggahan It leads to declining of degraded land. Before programme implementation, in 2005, there was 2,700 ha of degraded land in Nagari Paninggahan. In 2009, it declined to 2,251 ha. Moreover, The programme also impacts to income of participants' household. Participants obtain more benefit from reforestation activities and forest itself. Therefore, their living standard raised. Their house, access of their children to education, ownerships of electronic improved. For further land rehabilitation and reforestation, it is needed crucially to collaborate between local communities and local government for voluntarily carrying out the program.

Keyword : Programme on Land Rehabilitation

Pendahuluan

Pembangunan Nasional sejak dulu telah diarahkan untuk menganut konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Anonim, 2010). Pembangunan ini adalah upaya untuk mencapai keberlanjutan dalam empat hal, keberlanjutan ekologis yang merupakan keberlanjutan yang utama dan pertama, diikuti oleh keberlanjutan ekonomis, sosial budaya, dan politik hankam. Upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan itu tentu harus melewati jalan berliku dan panjang. Kebijakan dalam banyak hal haruslah ditempuh. Ada tiga hal yang harus dijadikan tumpuan dalam menjalankan roda pembangunan itu. Pertama sumber daya alami, kedua kualitas lingkungan, dan ketiga faktor kependudukan (Fauzi, 2004).

Pertanian masih merupakan sektor yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional, sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan, penyedia bahan baku industri, sebagai sumber pemasukan negara, penyedia lapangan kerja dan sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan. (Badan Pusat Statistik, 2008).

Kondisi Lahan di Sumatera Barat

Luas wilayah propinsi Sumatera Barat adalah $\pm 4.228.730$ Ha. $\pm 2.600.286$ Ha (61,48 %) merupakan kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Suaka Alam, Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdapat pada lampiran 1 (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999)

Peningkatan kegiatan dibidang subsektor kehutanan membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat, tetapi dilain pihak juga mempunyai pengaruh negatif bagi fisik dan kondisi hutan. Pengelolaan hasil hutan yang dilakukan secara terus menerus tanpa dilakukannya penanaman kembali akan mengganggu ekosistem dan daya dukung lahan hutan.

Sumatera Barat yang memiliki hutan alam yang dulunya mendominasi wilayah Minangkabau, sekarang hanyalah terdapat pada kawasan – kawasan hutan lindung. Hal ini terjadi karena tingginya angka pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pengalihan lahan hutan menjadi lahan pertanian yang semakin besar. (Arifin, 2003) Alasan yang menyebabkan terjadinya penebangan hutan sehingga terjadi proses pengalihan lahan hutan diantaranya: 1) Perluasan lahan pertanian dan atau pengembangan ternak, 2) permintaan pasar dan nilai ekonomi kayu, 3) Pemukiman, 4) Tempat penampungan air, 5) Penggalian bahan tambang, 6) Bencana alam.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan yang dampaknya semakin luas bagi masyarakat, yaitu meningkatnya bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Dampak tersebut akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur asset pemabngunan, baik berupa moril maupun materil yang berujung pada terganggunya tata kehidupan masyarakat.

Untuk itulah pemerintah mecanangkan suatu gerakan yang akan melibatkan seluruh instansi dan lapisan masyarakat dalam upaya pemulihan sumberdaya alam melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui kegiatan Hutan Rakyat yang tujuannya untuk mobilisasi sumberdaya untuk percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi dengan indikator : (1) pulihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak pada lokasi kegiatan GNRHL, (2) hutan dan lahan berfungsi secara optimal dan lestari, (3) kondisi lingkungan dan tata air baik, (4) mendukung kelangsungan industri kehutanan dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial baik secara langsung sebagai pelaku Hutan Rakyat maupun sebagai pemungkim di lokasi Hutan Rakyat.

Hutan rakyat yang tujuan akhirnya diharapkan mampu memperbaiki kualitas lahan dan hutan dan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hutan Rakyat merupakan kegiatan penanaman pohon dalam kawasan hutan yang rusak merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, yang ditanami Tanaman Unggulan Lokal (TUL) yaitu tanaman hutan (kayu-kauan) jenis asli daerah yang bersangkutan yang memiliki nilai dagang yang tinggi dan Tanaman MPTS yaitu jenis tanaman serba guna yang dapat diambil buah, bunga, kulit dan daunnya.

Melalui pembangunan Hutan Rakyat yang berkelanjutan dari tahun ke tahun serta pengelolaannya diarahkan sebagai kelompok tani, secara mandiri diharapkan akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan kebutuhan kayu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan disekitar hutan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lahan Kritis

a. Gambaran Umum Lahan Kritis

Istilah kritis dapat mengandung berbagai makna. Kritis dapat berkaitan dengan keadaan biofisik. Kekritisan biofisik dapat menyangkut fungsi produksi, fungsi lingkungan, fungsi kontruksi, fungsi lain-lain atau semua fungsi lahan. Keadaan ini dapat berupa bawaan alami (bencana alam), atau olah tingkah laku manusia (salah menggunakan lahan). Lahan kritis adalah tanah yang karena penggunaannya tidak sesuai dengan kemampuannya, telah mengalami atau dalam

proses kerusakan fisik, kimia dan biologi. Lahan kritis dapat hutan belukar, alang-alang dan tanah terlantar (kompas, 2010).

Lahan kritis yang terjadi pada suatu kawasan dapat disebabkan karena keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan air, topografi, vegetasi atau gabungan dari beberapa faktor tersebut. Penyebab kekritisan lahan biasanya disebabkan oleh faktor manusia. Dapat dikatakan bahwa faktor peranan manusialah yang merupakan faktor utama dalam proses terjadinya kerusakan tanah. Manusia selain dapat melakukan hal-hal positif (perbaikan, pemeliharaan dan lain-lain), akan tetapi karena masing-masing mengejar kepentingan-kepentingannya (sadar atau tidak disadar) hal-hal/kegiatan-kegiatan yang negatif bahkan lebih sering dilakukannya (seperti pembukaan hutan untuk pertanian yang berpindah-pindah, penebangan-penebangan liar, pengolahan tanah yang salah, penggunaan tanah yang secara terus menerus tanpa diimbangi dengan pemeliharaan dan perbaikan lain-lain)(Kartasapoetra, 1989).

b. Ukuran Kekritisan Lahan dan Pesebaran Lahan Kritis

Pesebaran lahan kritis dapat digolongkan dalam tiga kawasan yaitu: (1) lahan kritis dikawasan pantai; kawasan pantai akan menjadi lahan kritis jika terjadi pengikisan pantai oleh gelombang laut (abrasi) yang kuat, dimana abrasi dapat menyebabkan lapisan sediment (endapan) akan hancur dan lenyap, yang sering terjadi pada muara sungai yang pantainya terbuka dengan gelombang laut yang besar, (2) Lahan Kritis di Kawasan Dataran Rendah; lahan kritis dikawasan dataran rendah terjadi akibat adanya genangan air atau proses sedimentasi (pengendapan) bahan yang menutupi lapisan tanah yang subur, dimana genangan air terjadi karena tanahnya lebih rendah dari daerah sekitarnya, sehingga waktu hujan lebat terjadi banjir dan air menggenang , dan (3) Lahan Kritis di kawasan Pegunungan/Perbukitan; lahan kritis di kawasan pegunungan terjadi akibat adanya longsor, erosi atau *soil creep* (tanah merayap), lapisan tanah yang paling atas (*top soil*) terkelupas, sisanya tanah yang tandus bahkan sering merupakan bantuan padas (keras) yang mana hal ini sering terjadi dikawasan pegunungan dengan lereng terjal dan miskin tumbuhan penutup. Lahan kritis di kawasan pegunungan banyak dijumpai pada pegunungan yang hutannya telah rusak (Romenah, 2008).

Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)

Pemerintah pada tahun 2003 memproklamkan GNRHL dengan tema GNRHL Sebagai Komitmen Bangsa Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Rakyat yang akan diprioritaskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat kritis. GNRHL yang lahir dari Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor: 09/Kep/III/Menko/Kesra/III/2003, Kep.16/M.Ekon/03/2003, dan Kep.08/Menko/Polkam/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional.

Kegiatan GNRHL direncanakan selama 5 (lima) tahun dengan sasaran seluas 3 juta hektar yang dimulai tahun 2003 seluas 300.000 hektar tersebar di 15 propinsi dan 145 Kabupaten/Kota yang dalam penyelenggaraannya diatur dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts-II/2003 tentang penyelenggaraan Pelaksanaan GNRHL 2003. penyelenggaraan kegiatan GNRHL bertujuan untuk mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yang diarahkan untuk penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran serta semua pihak melalui mobilitas sumberdaya (Dephut, 2004).

Program Hutan Rakyat melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) merupakan suatu bentuk kegiatan perbaikan ekosistem hutan yang dilakukan melalui kegiatan Hutan Rakyat dengan menanam tanaman produktif seperti alpukat, coklat, kemiri dan tanaman lainnya. Program ini di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Nagari Panningahan Kabupaten Solok yang mana telah dilaksanakan semenjak tahun 2003.

Tujuan program Hutan Rakyat ini tidak jauh beda dengan program-program pemerintah lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tanaman hutan rakyat dalam rangka rehabilitasi
- b. Untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan berbagai hasil tanaman hutan rakyat berupa kayu-kayuan dan non kayu
- c. Memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
- d. Serta meningkatkan kualitas lingkungan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.

Evaluasi Program

Kata-kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai pedoman istilah dari penilaian yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Evaluasi merupakan kegiatan terencana dan sistematis meliputi pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta, penggunaan pedoman yang telah ditetapkan, pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Mardikanto, 1993).

Secara eksplisit, pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap-tahap dan siklus pengelolaan proyek yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap purna pelaksanaan. Peranan evaluasi disini adalah rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, maka evaluasi diperlukan sebagai teknik yang dapat dipakai oleh para perencana (Meuthia, 2000).

Indikator spesifik yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan evaluasi proyek adalah: mutu (Q), biaya (C) dan waktu (T). indikator spesifik tersebut dikenal dengan sebutan “*project constraint*” (Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007). Sehingga evaluasi penyelenggaraan proyek dinilai berhasil jika sasaran proyek dapat dicapai:

- a. Dengan mutu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- b. Dengan batas biaya yang dianggarkan
- c. Dengan kurun waktu yang ditentukan

Menurut Husen (2009) dalam evaluasi proyek, yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam evaluasi proyek serta membutuhkan penanganan yang cermat antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek keuangan
Masalah ini berkaitan dengan pertimbangan dan pembiayaan proyek
- b. Aspek anggaran biaya
Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Perencanaan yang matang dan terperinci akan memudahkan proses pengendalian biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Jika sebaliknya, akan terjadi peningkatan biaya yang besar dan merugikan bila proses perencanaannya salah.
- c. Aspek sumber daya manusia
Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama proyek berlangsung yang berfluktuatif. Agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks, aspek ini didasarkan atas organisasi proyek yang dibentuk sebelumnya.
- d. Aspek efektivitas dan efisiensi
Masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi/tidak efektif atau dapat juga terjadi bila faktor efisiensi tidak terpenuhi, sehingga usaha produksi membutuhkan biaya yang besar.
- e. Aspek waktu
Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya bila terlambat dari yang direncanakan serta akan menguntungkan bila dapat dipercepat.

Aspek Ekonomi

a. Tinjauan Umum Tentang Usahatani

Usahatani didefinisikan sebagai tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, bisa sebagai seorang pemilik, penyakap, ataupun seorang manejer yang digaji. Usahatani juga merupakan himpunan dari sumber- sumber alam yang tedapat disuatu tempat yang diperlukan untuk produksi seperti tubuh, tanah dan air. Perbaikan usahatani bisa berupa bercocok tanam atau memelihara ternak (mubyarto, 1994).

Melihat sejauh mana kegiatan usahatani berhasil dilakukan, maka dapat dilihat dari pengelolaan usahatannya. Dalam hal ini menurut Soekartawi (1984), pengelolaan suatu usahatani menggambarkan tingkat kemampuan petani dalam menentukan penggunaan faktor-faktor produksi yang beragam seefektif mungkin.

Tujuan dari setiap pemimpin usahatani bukanlah memperoleh produksi yang maksimum melainkan mencapai selisih yang paling tinggi antara penerimaan dan pengeluaran usahatani keseluruhan (Mosher, 1991).

Pendapatan Usahatani

Meningkatnya taraf hidup petani ditandai dengan meningkatnya pendapatan petani tersebut. Menurut Soekartawi (2003), pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu nilai yang dijual maupun yang tidak dijual. Jangka waktu pembukuan umumnya setahun dan mencakup semua produk antara lain : dijual, dikonsumsi, rumah tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk bibit ataupun makanan ternak, untuk pembayaran, disimpan atau ada digudang pada akhir tahun.

Salah satu ukuran penampilan uasahatani adalah pendapatan. Menurut Suryana (1981), pendapatan usahatani adalah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah produksi total dengan harga satuan yang berlaku. Sedangkan pengeluaran adalah semua nilai penggunaan sarana produksi atau sesuatu yang dibebankan kepada proses produksi yang bersangkutan.

Analisa pendapatan usahatani merupakan salah satu cara untuk membandingkan biaya dan pendapatan dari proses produksi. Usahatani dikatakan menguntungkan bila penerimaan lebih besar dari biaya dan disebut rugi apabila penerimaan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usahatani. Data yang diperlukan untuk data ini adalah jumlah dan harga input yang digunakan serta jumlah dan harga output yang dihasilkan (Suryana, 1981).

Perhitungan penerimaan usahatani perlu dilakukan didalam perhitungan analisa usaha. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah nilai produksi yang dihasilkan semakin besar pula penerimaan. Sebaliknya produksi yang rendah akan memberikan penerimaan yang rendah pula. Akan tetapi tingginya penerimaan

tidak menjamin tingginya pendapatan, karena pendapatan merupakan selisih positif antara biaya dengan penerimaan dari hasil usahatani.

Selisih antara pendapatan kotor usahatani dan pengeluaran total usahatani disebut pendapatan bersih usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani.

Tanaman Hutan Rakyat

Tanaman Kemiri

Kemiri (*Aleurites Moluccana Willd*) berasal dari kepulauan Maluku. Tanaman ini menyebar dari sebelah timur Asia hingga Fiji di kepulauan Pasifik. Di Indonesia kemiri tersebar luas hampir seluruh wilayah Nusantara.

Kemiri tumbuh dengan baik pada tanah-tanah kapur, tanah-tanah berpasir pantai. Tetapi juga tumbuh pada tanah-tanah podsolik yang kurang subur sampai yang subur dan pada tanah-tanah latosol. Tanaman kemiri dapat tumbuh dan berproduksi baik pada ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut, walaupun di beberapa tempat juga dapat tumbuh 1.200 meter dpl. Tanaman kemiri dapat tumbuh pada lahan datar, bergelombang dan bertebing-tebing curam. Ditinjau dari kondisi iklimnya, tanaman kemiri dapat tumbuh di daerah-daerah yang beriklim kering dan basah. Tanaman kemiri dapat tumbuh di daerah dengan jumlah curah hujan 1.500-2.400 mm per tahun dan suhu 200-270C.

Ketersediaan bibit tanaman merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam upaya pengembangan komoditi kemiri. Untuk mendapatkan bibit tanaman kemiri dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu (1) Generatif, (2) Vegetatif dan (3) Sambungan.

Tanaman Coklat

Salah satu tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis yang tinggi adalah tanaman coklat atau kakao (*Theobroma cacao L.*), sehingga menarik minat petani maupun pengusaha untuk mengembangkannya. Pada umumnya tanaman coklat merupakan bahan baku untuk berbagai jenis produk bahan makanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga peluang besar bagi petani tanaman coklat untuk mengusahakannya. Semakin luas lahan yang diusahakan maka produk akan lebih tinggi sehingga akan dapat mempengaruhi pendapatan petani (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2004).

Daerah penanaman coklat berada pada 10⁰ LU sampai 10⁰ LS. Walaupun demikian penyebaran pertanaman coklat secara umum berada pada daerah antara 7 LU sampai dengan 18 LS. Hal ini erat kaitannya dengan distribusi curah hujan dan jumlah penyebaran matahari sepanjang tahun. Dengan demikian Indonesia yang berada pada 5 LU sampai 10 LS masih sesuai dengan penanaman coklat,

curah hujan 1100-3000 mm/tahun dengan temperatur 30-32 °C maksimal dan 18-21 °C minimal sangat cocok untuk penanaman coklat.

(Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 2004), jarak tanaman yang ideal bagi tanaman coklat adalah jarak yang sesuai dengan perkembangan bagian atas tanaman serta cukup tersedianya ruang bagi perkembangan perakaran di dalam tanah atau jarak tanam optimum bergantung pada bahan tanam dan kejagurannya (besarnya pohon), jenis tanah dan iklim areal. Ditinjau dari segi produksinya, jarak tanam 3m x 3m, 4m x 2m atau 3,5m x 2,5 m adalah sama, walaupun jarak tanam 3m x 3m membutuhkan waktu lebih lama untuk pertautan tajuknya. Lubang tanam yang ideal bagi tanaman coklat juga tergantung kepada jenis tanah, namun biasanya lubang tanam yang dibuat adalah pada sekitar 30 cm.

Tanaman alpukat

Bagian tanaman alpukat yang banyak dimanfaatkan adalah buahnya sebagai makanan buah segar. Tanaman alpukat tumbuh subur pada dataran rendah beriklim tropis dengan curah hujan 2500 mm/tahun. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar 15-30 °C. Tanaman alpukat agar tumbuh optimal memerlukan tanah gembur, tidak mudah tergenang air, subur dan banyak mengandung bahan organik. Ketinggian tempat yang dikehendaki tanaman alpukat agar dapat tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan adalah 200-1000 m dpl (Indriani, 1997).

Menurut (Indriani, 1997) waktu penanaman yang tepat pada bibit alpukat adalah pada awal musim hujan dan tanah yang ada dalam lubang tanam harus lebih tinggi dari pada tanah sekitarnya, hal ini untuk menghindari tergenangnya air bila disirami atau turun hujan. Jarak tanam yang baik adalah 12 x 12 m dengan ukuran lobang tanam 60 cm x 60 cm x 40 cm. Bibit yang telah ditanam, setelah berumur 1-4 tahun sudah dapat dipetik buahnya. Pemeliharaan tanaman alpukat terdiri dari penyulaman, penyiangan, pendangiran, pemangkasan tanaman, dan pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Dalam pembudidayaan tanaman alpukat, diperlukan program pemupukan yang baik dan teratur. Mengingat sistem perakaran tanaman alpukat, khususnya akar-akar rambutnya hanya sedikit dan pertumbuhannya kurang ekstensif maka pupuk diberikan dengan dosis kecil dan jumlah pupuk yang diberikan tergantung dengan umur tanaman. Bila program pemupukan tahunan diberikan pupuk urea, TSP dan KCl. Untuk tanaman berumur muda (1-4 tahun) diberikan urea, TSP dan KCl masing-masing sebanyak 0,27-1,1 kg/pohon, 0,5-1 kg/pohon, dan 0,2-0,83 kg/pohon. Dan untuk tanaman umur produksi (5 tahun lebih) diberikan urea, TSP dan KCl masing-masing sebanyak 2,22-3,55 kg/pohon, 3,2 kg/pohon dan 4 kg/pohon. Pupuk sebaiknya diberikan empat kali dalam setahun. Mengingat tanaman alpukat hanya memiliki sedikit rambut akar, maka sebaiknya pupuk diletakkan sedekat mungkin dengan akar (Indriani, 1997).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Hutan Rakyat di Nagari Paninggahan telah terlaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - (a) Proses persiapan program sudah berjalan dengan baik, walau ada beberapa kekurangan seperti sosialisasi yang kurang dari pemerintah, sehingga pengetahuan petani mengenai program masih kurang, (b) Proses pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan ketetapan, walau ada beberapa kekurangan seperti penyaluran dana dan alokasi bibit yang pelaksanaannya tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan, menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan penanaman dan (c) Proses pengawasan program kurang terlaksana dengan baik, disebabkan karena jumlah tenaga pengawas yang tidak mencukupi dan memiliki waktu yang tidak terjadwal.
2. Evaluasi program Hutan Rakyat di Nagari Paninggahan ditinjau dari segi mutu program, kesesuaian biaya program dan kesesuaian waktu program.
 - (b) Mutu program baik menurut petani maupun *stakeholders* masuk dalam kategori sesuai artinya masih kurang tercapai, hal ini disebabkan oleh penyaluran bibit yang kurang tepat waktu, pengawasan yang kurang dan sosialisasi yang kurang, (b) Kesesuaian biaya program, Kesesuaian biaya oleh pengelola berada pada kategori sangat sesuai dan kesesuaian biaya oleh petani berada pada kategori sesuai. Kesesuaian biaya yang tidak mencapai 100% ini terjadi karena beberapa masalah yaitu : a). Petani tidak mengetahui waktu pengambilan bantuan, b). Kurangnya transparansi kepada petani pada penyaluran dana, c). Petani tidak mengetahui jadwal pengambilan bibit, dan d). Penyaluran bibit dilakukan pada orang yang kurang tepat. (c) Kesesuaian waktu program, Kesesuaian jadwal program berada pada kategori sesuai artinya masih kurang tercapai, tidak tercapainya kesesuaian jadwal program 100% disebabkan karena kurangnya informasi tentang jadwal pelaksanaan kegiatan yang diterima petani,
3. Manfaat ekonomi yang diperoleh petani dengan adanya kegiatan Hutan Rakyat di Ngari Paninggahan yaitu: Manfaat yang diperoleh berupa penambahan pendapatan yang bersumber dari kegiatan usahatani dan non usahatani. Total pendapatan rata-rata rumah tangga yang diperoleh oleh masyarakat pelaksana kegiatan Hutan Rakyat sejak tahun 2004-2008 adalah Rp 10.050.549,71. (a) Sumber pendapatan ini diperoleh dari pendapatan sebelum tanaman Hutan Rakyat menghasilkan (pendapatan yang diperoleh pada tahun 2004-2006), Total pendapatan rata-rata yang diperoleh sebelum tanamanan Hutan Rakyat menghasilkan adalah Rp 2.319.398. (b) Sumber pendapatan ini diperoleh dari pendapatan setelah tanaman Hutan Rakyat

menghasilkan (pendapatan yang diperoleh pada tahun 2007-2008), total pendapatan rata-rata yang diperoleh setelah tanamana Hutan Rakyat menghasilkan adalah Rp 7.038.151,71. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan Hutan Rakyat yang dilaksanakan di Nagari Paninggahan sejak tahun 2003 sampai tahun 2008 telah memberikan manfaat kepada petani pelaksana berupa penambahan pendapatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abril.2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian (Studi Kasus Kelompok Tani Karamunting Jaya, Jorong Tengah Padang Nagari Cupak*. Kota padang. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Adiwilaga, Anwas. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Anonim,2009. *Pembangunan Berkelanjutan*. Diakses Juli 2009 dari <http://di.wikipedia.org/wiki/Pembangunan-Berkelanjutan>
- Arifin, H. S., *et al.* 2003. *Agroforestry di Indonesia*. World Agroforestry Center (ICRAF). <http://www.worldagroforestrycentre.org/sea> [10 Desember 2007].
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2006. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis*. <http://www.litbang.deptan.go.id>.
- Badan Pengelolaan DAS Agam Kuantan. 2006. *Rehabilitasi Kawasan Hutan*. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi,2007.
- Departemen Kehutanan,2004. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999*. <http://cetak.kompas.com/> [September 2004].
- Deswita, Dian. 2003. *Analisa Usahatani Pembesaran Ikan Mas Dengan Sistem Keramba Air Tenang dan Permasalahannya di Kenagarian Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Devi, Nila Surya. 2006. *Analisa Usahatani dan Pemasaran Bengkoang Di Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 2004. *Lahan kritis*. Solok.
- Effendi, Supli. 2000. *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Fadli, Zul Afi. 2006. *Analisa Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Padi Sawah Antar Pengguna Han Traktor Jenis Bajak Singkal dengan jenis Kura-kura (Studi Kasus: kelompok Tani Padang Lintang Kelurahan VI. Kecamatan Lubuk Sikarah. Kota Solok*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Unversitas Andalas. Padang.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Gunawan, M. 1979. *Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian*. Proyek Studi Dinamika Pedesaan. Survey Agronomi bekerjasama dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Jakarta.
- Hadisapoetro, S. 1973. *Biaya dan Pendapatan Dalam Usahatani*. Departemen Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta. 17 hal.
- Hubeis. 2004. *Kawasan Lahan Kritis*. Grata Geogravi. Jakarta.
- Indriani, Y. Hetty, Summinarsih, Emi. 1997. *Alpoket*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Irwanto, 2007. *Budidaya Tanaman Kehutanan*. Diakses Juli 2009 dari <http://www.irwantoshut.com/>.
- Kartasapoetra, 1989. *Pengantar Ilmu Tanah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardikanto. 1993. *Evaluasi Manajemen Penerapan Program Intensifikasi Usahatani Padi Dengan Metode System Of Rice Intensification (SRI) Lubuk Basung Kabupaten Agam*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Moebyarto, 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Sinar Harapan Jakarta.
- Mosher. 1983. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Munif. 2009. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta. Sinar Harapan
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romanah. 2008.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soekartawi. 1984. *Ilmu Usaha Tani Dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* terjemahan dari Jhon. L.D. Brian, Ha. UI-Press. Jakarta.
- Suastika, I Wayan dkk. 1997. *Budidaya Padi Sawah di Lahan Pasang Surut*. Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Diakses Juli 2010 dari <http://geo.ugm.ac.id/idarchives125>.
- Suryana, A. 1981. *Analisa Pendapatan Usahatani, Enterprise, Parsial, dan Parametik*. Makalah disampaikan pada Latihan Metodologi Penelitian Agro Ekonomi. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Institut Pertanian Bogor.
- Syahyuti. 2006.
- Marolop, Van de ban. 2005. *Study Manajemen Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Nagari Koto Tangah*. Padang. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.

